

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya merupakan suatu proses yang wajar dan terlaksana sejak manusia dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Hal ini disebabkan karena manusia memerlukan daya dukung unsur-unsur lingkungan untuk kelangsungan-hidupnya. Udara, air, makanan, sandang, papan, dan seluruh kebutuhan manusia harus diambil dari lingkungan hidupnya. Lingkungan tidak dapat mendukung jumlah kehidupan yang tanpa batas. Apabila daya dukung lingkungan itu terlampaui, maka manusia akan mengalami berbagai kesulitan.¹ Kian kentalnya berbagai kepentingan banyak pihak, khususnya negara-negara maju yang kian mengeksplorasi industri strategis mereka juga berdampak pada masalah lingkungan hidup.²

Permasalahan lingkungan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi dan cenderung sulit untuk diatasi, seperti adanya penumpukan sampah dan limbah hasil konsumsi masyarakat. Perubahan gaya hidup masyarakat secara tidak langsung juga berpotensi memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan.³ Sampah merupakan problem lingkungan yang mungkin akan terus berlangsung di tengah masyarakat dalam kesehariannya. Budaya tertib sampah yang dicanangkan pemerintah ternyata belum mampu menanggulangi secara tuntas. Apalagi jenis

¹ Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan & Pespektif Islam* (Jakarta: kencana, 2010), 181.

² Nadjamuddin Ramly, *Islam Ramah Lingkungan* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 9.

³ Febriana Adiya Rangkuti, "Dampak Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (Tpas) "Namo Bintang" Terhadap Masyarakat", (Skripsi, IPB, Bogor, 2014), 1.

sampah semakin hari seolah semakin beragam, sehingga proses penanganannya pun memerlukan metode yang beragam pula.

Di sekitar pedesaan sampah relatif mudah ditangani lantaran lahan pemrosesan masih mudah dihasilkan. Namun terkadang kecerobohan masyarakat membuat masalah ini menjadi serius. Hingga selain menimbulkan gangguan bau tidak sedap, beragam penyakit juga mungkin timbul akibat penumpukan sampah yang akhirnya menjadi sarang nyamuk.⁴

Sampah secara sederhana dapat diartikan sebagai segala barang padat yang tidak terpakai lagi. Seringkali sampah menimbulkan masalah yang serius jika tidak dikelola dengan tepat. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah atau volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang/material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari 'pengelolaan' gaya hidup masyarakat.⁵

Peningkatan jumlah timbunan sampah secara tidak langsung menimbulkan dampak negatif, namun jika sampah dikelola dengan baik akan menimbulkan dampak positif seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pengelolaan sampah mendukung adanya penyerapan tenaga kerja, seperti terbukanya lapangan pekerjaan baru dan

⁴ Ahsin Sakho Muhammad, *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)* (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 42.

⁵ Kasam, "Analisis Resiko Lingkungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah (Studi Kasus: TPA Piyungan Bantul)", *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, 1, (Januari, 2011), 1.

manfaat ekonomi dari pengolahan sampah serta perbaikan kualitas lingkungan yang secara tidak langsung terjadi.⁶

Dari perspektif otonomi daerah di bidang lingkungan hidup disebutkan bahwa dua aspek penting yang menjadi urusan wajib, yakni pengendalian lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan pada konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁷

Secara ekologis, potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup semakin lama mengalami penurunan karena daya dukung, daya tampung, dan daya lenting semakin tidak seimbang. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan pembelajaran yang serius bagaimana menciptakan tata pemerintahan yang baik agar perencanaan perumusan penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan dapat diputuskan dengan baik. Asumsi ini sangat beralasan karena tanpa adanya perwujudan prasyarat *good environmental governance* yang mencakup nilai-nilai kesadaran, etika, tanggung jawab, serta responsibilitas semua pemangku kepentingan maka persoalan pengelolaan lingkungan hidup yang bertumpu pada manajemen tata pemerintahan yang baik akan sulit dilaksanakan. Dapat disarikan bahwa *Good Environment Local Governance* (GELG) merupakan suatu kebijakan yang strategis, terukur, dan menjamin adanya budaya perwujudan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁸

⁶ Rangkuti, *Dampak*, 1.

⁷ Lilin Budiati, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 5.

⁸ *Ibid.*, 9-10.

Selama ini, kegiatan pembangunan yang dirancang untuk memadukan semua *stakeholders* dapat dikatakan belum memenuhi harapan berbagai pihak. Kalangan akademisi cukup banyak memberikan catatan korektif dari hasil studinya, bahwa pelaksanaan *good governance* melalui program peningkatan kapasitas kelembagaan birokrasi berjalan lamban, bahkan hasilnya tidak meningkatkan kinerja yang lebih baik.

Maka dibutuhkan kelihaiian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya. Selain berusaha memakmurkan rakyat, pemerintah daerah harus berusaha menjaga kelestarian lingkungan. Semua ini akan terlaksana jika Pemerintah daerah mempunyai paradigma pembangunan daerah yang berkelanjutan. Perlu disadari, pembangunan yang hanya menekankan sisi ekonomi saja dan mengabaikan sisi sosial dan ekologinya hanya memberikan kesenangan sesaat. Sementara efek negatifnya akan menimpa masyarakat secara keseluruhan di beberapa tahun kemudian.⁹

Permasalahan sampah di berbagai perkotaan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Pada suatu perubahan pembangunan suatu kota tentu akan menimbulkan dampak bagi kota tersebut. Dengan bertambahnya populasi penduduk kota maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi oleh kota tersebut. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat

⁹ Ramly, *Islam Ramah Lingkungan.*, 70.

mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah diatas masalah.

Untuk mengatasi masalah produk sampah sudah tentu dibutuhkan TPS (Tempat Pembuangan Sampah) sementara dan selanjutnya akan diangkut dan dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah. Yang biasa dan yang akan menjadi masalah dalam pembuangan sampah ke TPA adalah tempat TPA yang kurang baik yang biasa dilakukan di berbagai kota yaitu dengan metode *open dumping* dan *sea dumping* sudah tidak layak lagi, karena akhir dari pembuangan sampah ke TPA akan menghasilkan masalah dan bukan menyelesaikan masalah. Sehingga diperlukan TPA yang layak dan dapat dipergunakan diseluruh kota.¹⁰

Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)¹¹ harus ada sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang baik. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah di tetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Dengan adanya manajemen pengelolaan tersebut, maka terlihat tahap demi tahap yang akan di lakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab yang berada di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan sampah tersebut.

¹⁰Ricky Prabowo, "Pengelolaan Sampah Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto, (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011), 18.

¹¹Perubahan istilah dari Tempat Pembuangan Akhir menjadi Tempat Pemrosesan Akhir setelah keluarnya UU No 18 tahun 2008.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat.¹² Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelola sampah dan masalah biaya.¹³

Beberapa penelitian juga dilakukan untuk menentukan prioritas aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan sampah. Menurut Amurwaraharja dalam rangka menentukan alternatif teknologi pengolahan sampah ada empat aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknis. Kriteria dari aspek sosial diantaranya penyerapan tenaga kerja, potensi konflik dengan masyarakat rendah, menumbuhkan lapangan usaha, menumbuhkan sektor formal dan informal, penguatan peran serta masyarakat. Aspek ekonomi dapat dijabarkan menjadi tiga kriteria, yaitu investasi rendah, biaya operasional rendah, menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Adapun kriteria dari aspek lingkungan dapat dijabarkan menjadi kriteria-kriteria yaitu meminimalisir pencemaran air, meminimalisir pencemaran udara dan bau. meminimalisir pencemaran tanah, meminimalisir habitat bibit penyakit, meminimalisir

¹²Rika Pratiwi Wulandari, "Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang", (2014), 1.

¹³Dwi Urip Setyoaji, "Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Proses Pengelolaan Sampah Perkotaan", (Mei, 2018), 7.

penurunan estetika/keindahan lingkungan, kesesuaian dengan arahan pengembangan kota. Kriteria aspek teknis dapat dijabarkan yaitu tingkat efektifitas dalam mengurangi tumpukan sampah, dapat mengatasi masalah keterbatasan lahan, ketersediaan lokasi, ketersediaan teknologi, kemudahan penerapan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya.¹⁴

Meneliti urutan aspek prioritas yang perlu diperhatikan dalam menentukan model pengelolaan sampah yaitu aspek sosial, lingkungan, ekonomi dan prioritas terakhir adalah teknologi.¹⁵ aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mempertimbangkan strategi pengelolaan sampah terpilih berdasarkan urutan prioritas dengan menggunakan *Analytical Hierarchi Process* yaitu kebijakan pemerintah, lingkungan, pembiayaan, kesehatan dan persepsi masyarakat.¹⁶

Manajemen pengelolaan sampah yang kompleks dengan multi tahapan; mulai dari sampah dihasilkan pada tingkatan rumah tangga, sampah industri atau sampah agraris, pengumpulan sampah, transportasi sampah, fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah sampai pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah harus mendapat perhatian yang serius dari instansi yang bertanggung jawab disetiap daerah untuk mencegah atau memperkecil pencemaran yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu pada proses pengelolaan sampah, TPA

¹⁴Amurwaraharja, "Analisis Teknologi Pengolahan Sampah dengan Proses Hierarki Analitik dan Metoda Valuasi Kontingansi (Studi Kasus di Jakarta Timur)", (Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2003) 3.

¹⁵Surjandari I., Hidayatno A., Supriatna A, "Model Dinamis Pengelolaan Sampah Untuk Mengurangi Beban Penumpukan", *Jurnal Teknik Industry*, 11 (2009), 134-147.

¹⁶Rizqi Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)", *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, 3 (2017), 66-74.

sampah memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat mengembalikan sampah ke lingkungan.¹⁷

Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah merupakan salah satu program nasional di daerah, yang berkaitan dengan penyediaan tempat penampungan akhir sampah. UU No 18 Tahun 2008 menyatakan pada BAB XVI Ketentuan Peralihan Pasal 44 bahwa “Pemerintah daerah harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah yang menggunakan system pembuangan terbuka (*open dumping*) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini”.

Mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya tempat pemrosesan akhir sampah maka tempat tinggal penduduk harus memiliki jarak tertentu ke TPA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BKLH mengenai AMDAL bahwa tidak ada pemukiman penduduk yang boleh berjarak kurang dari satu kilometer.¹⁸

Pemeliharaan/perlindungan lingkungan hidup (*hifdh al bi`ah*) berbasis masalah sangat penting dilakukan sepenting kelestarian kehidupan itu sendiri. Eksploitasi alam secara berlebihan akan merusak ekosistem alam yang sudah teratur dan tertata rapi dalam hukum Allah (*sunnatullah*). Jika keadaan tersebut dibiarkan terus menerus tanpa ada kearifan lokal maupun global yang tercermin dalam undang-undang maupun konservasi atau peraturan-peraturan

¹⁷Putra Amantha Hasibuan, Ahmad Perwira Mulia Tarigan dan Zaid Perdana Nasution, “ Studi Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Sampah Dengan Metode Sistem Informasi Geografis (SIG) Di Kota Tebing Tinggi”, *Jurnal Teknik Sipil USU*, 1 (2014), 1.

¹⁸Rangkuti, *Dampak*, 7.

pemerintah, Maka tidak mustahil akan mengancam kehidupan semua makhluk hidup baik secara evolusioner maupun revolusioner.

Spiritualitas agama kembali dipertimbangkan oleh para ahli lingkungan untuk mengingatkan manusia. Para Ahli fikih mendapat kesempatan untuk berjihad dan menjadikan masalah ekologi sebagai bagian dari *maqashid al-syari'ah al-dharuriyah*, yakni tujuan primer disyariatkannya Islam. Gagasan dan sosialisasi fiqh lingkungan (*fiqh Al Bi`ah*) perlu di perluas sehingga menjadi wacana aktual keagamaan agar menggugah kesadaran umat terhadap urgensi pemeliharaan lingkungan (*Hifdhul al Bi`ah*) dan bahaya pengrusakan alam bagi kehidupan ekosistem kita di masa sekarang dan mendatang.¹⁹

Fiqh lingkungan berupaya menyadarkan manusia yang beriman supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab manusia yang beriman dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Allah SWT sebagai hunian tempat manusia menjalani hidup di bumi ini dari segala macam kerusakan dan pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.²⁰

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardlu kifayah*. Artinya, Semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup. Hanya saja, di antara yang paling bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini adalah pemerintah. Sebab, pemerintah adalah pihak yang mengemban amanat untuk mengurus

¹⁹ Muhammad Ghufroon, "Fikih Lingkungan", *Jurnal Al- Ulum*, 1, (Juni, 2010), 175.

²⁰ Alie Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 160.

urusan rakyat, termasuk lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban masyarakat adalah membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup.²¹

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berada di Desa Sekoto Kecamatan Badas. TPA tersebut dibangun dan beroperasi sejak tahun 1985 dengan luas area 3,5 Ha. Adapun pengoperasiannya menggunakan masih tergolong *open dumping* meskipun dilakukan penutupan/penimbunan sampah dengan tanah urug dilaksanakan tiap 2 (dua) minggu sekali.

Pengelolaan air lindi (air dari timbunan sampah) dilakukan secara biologis dengan menggunakan kolam stabilisasi. Namun hingga saat ini berjalan kurang optimal sehingga beberapa waktu, terutama saat musim penghujan air lindi melimpas ke saluran drainase dan masuk ke kanal yang melalui permukiman warga.

Saat ini, volume sampah yang masuk ke TPAS Sekoto sebesar ± 454 m³/hari dari 8 Ibu Kota Kecamatan (IKK). Tidak semua sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilakukan penimbunan tetapi ada yang diolah menjadi kompos. Proses pengomposan ini dilakukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto dan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Branggahan. Sampah yang diolah menjadi kompos diperkirakan mencapai 20 m³/hari. Selain itu juga ada kegiatan pemulungan

²¹Ibid., 200.

yang dilakukan oleh masyarakat sekitar lokasi TPA (45 orang) yang diperkirakan mencapai 20 m³/hari.²²

Menurut hasil observasi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten Kediri. Peneliti tertarik meneliti Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto, dikarenakan timbul berbagai masalah seperti berikut:

1. TPA tersebut masih menggunakan system pembuangan terbuka (*open dumping*),
2. Letaknya yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk sekitar kurang dari 500 meter,
3. Kurang tersedia dan terawatnya peralatan kerja.
4. Tercemarnya air dan tanah oleh air lindi (air dari timbunan sampah),
5. Bau busuk dari gas metan timbunan sampah yang mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar TPA,

Akibat pengelolaan yang belum maksimal berdampak buruk bagi masyarakat sekitar TPA, mulai dari tercemarnya air dan tanah oleh air lindi (air dari timbunan sampah), berjangkitnya penyakit, dan keluarnya gas methane yang berbau busuk sehingga mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Maka terkait dengan latar belakang tersebut diperlukan penelitian mengenai “***Analisis Manajemen Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Fiqh Lingkungan.***”

²²Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kediri, *Tempat Pemrosesan Akhir Sampah* (Kediri: Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Kediri, 2018).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto?
2. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto ditinjau dari Fiqh Lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto ditinjau dari Fiqh Lingkungan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi serta kajian untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman terkait permasalahan yang diteliti

khususnya Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto dari sudut kajian fiqh lingkungan.

b. Bagi mahasiswa

Untuk memberikan wawasan bagi mahasiswa tentang Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto yang terintegrasi dan ramah lingkungan.

c. Bagi Pengelola TPA

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah supaya dapat mengelola sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Sekoto dengan menjaga keseimbangan 3 aspek yaitu ekologi, sosial, dan ekonomi.

E. Telaah Pustaka

Setelah mengadakan penelaahan berbagai penelitian atau karya ilmiah yang sudah pernah membahas tentang pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA). Beberapa karya ilmiah yang membahas pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir (TPA) diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Pratiwi Wulandari, dengan judul Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang.²³ Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk manajemen pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir

²³Rika Pratiwi Wulandari, "Manajemen Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang", (2014).

sampah (TPA) Ganet pada Kantor Dinas Tata Kota Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Kota Tanjungpinang. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Ganet Tanjungpinang belum adanya pemanfaatan gas metan, belum adanya pemanfaatan air lindi dengan menggunakan airase, Saran yang disampaikan yakni sumber daya manusianya untuk lebih ditingkatkan lagi dengan menambah sumber daya manusia di bidang keahlian khusus, adanya penambahan lahan baru, adanya pengelolaan dan pemanfaatan gas metan menjadi sumber energi dan pengelolaan air lindi dengan menggunakan system airase serta meningkatkan jumlah sampah organik untuk di olah menjadi kompos kemudian perlu dilakukan pemilahan sampah non organik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti Nigiana P.P, Endang Larasati, Nina Widowati, dengan judul Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembalang.²⁴ penelitian ini mengkaji manajemen pengelolaan sampah di kecamatan tembalang. Penelitian tersebut mendapatkan hasil pertama, Kegiatan manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang telah berhasil dilaksanakan dengan prosedur 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui proses pemilahan sampah. Manajemen pengelolaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada proses *planning, organizing, actuating, maupun cotrolling*, namun begitu masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan di beberapa aspek, seperti

²⁴Jayanti Nigiana P.P, Endang Larasati, Nina Widowati, "Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembalang". Vol. 5, No. 1 (2016).

penanganan berbagai kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang. Kedua, Kendala utama dari kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang ini adalah pada bagaimana merubah paradigma lama yaitu dari membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pentingnya kegiatan pengelolaan sampah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Puteri Mahyudin, dengan judul *Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)*.²⁵ Penelitian ini mengkaji permasalahan pengelolaan sampah dan dampak lingkungan di TPA. Penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang utama adalah sampah yang tidak mengalami proses pengolahan dan pengelolaan TPA dengan sistem yang tidak tepat (masih berfokus pada lahan urug). Pengelolaan TPA terpadu merupakan suatu kebutuhan penting manusia. Keberadaan TPA sebagai tempat pemrosesan akhir sampah sepatutnya diadakan dengan pertimbangan keamanan ketat terhadap pencemaran untuk masa sekarang dan mendatang. TPA tetap menjadi salah satu cara penanganan sampah akhir yang populer karena sangat sulit untuk memusnahkan atau mengurangi jumlah produksi sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan manusia seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang pesat. Sulitnya mengelola TPA dan dampak lingkungan

²⁵Rizqi Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah Dan Dampak Lingkungan Di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)", *Jukung Jurnal Teknik Lingkungan*, Vol. 3, No. 1 (2017).

yang besar dari TPA mengharuskan pengelolaan TPA yang lebih baik lagi terutama dalam hal mengolah sampah dengan daur ulang.

Berdasarkan penelitian skripsi maupun jurnal diatas, tidak ditemukan pembahasan tentang analisis manajemen pengelolaan sampah ditinjau dari fiqh lingkungan. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk membahas permasalahan ini.